

LAPORAN TAHUNAN ASPPUK 2011

Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Melalui
Pengembangan UMKM



Sekretariat Nasional ASPPUK
Jl. Pintu 2 TMII No.37 A RT 015 RW 03, Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar,
Jakarta Timur, 13560, Telp. 021-8406172 Fax. 021-87780329
email: asppuk@indo.net.id website: www.asppuk.or.id

Daftar isi

Daftar isi	1
Latar Belakang	2
visi dan misi asppuk	3
Kegiatan Pokok	4
A. Memfasilitasi dan Memperkuat Anggota Asosiasi	
A.1. Penguatan Anggota Melalui Peningkatan Kapasitas Pengembangan Usaha & Advokasi	5
A.2. Pengembangan BDS (business development services) di Tingkat Ornop dan Wilayah	6
A.3. Monitoring dan Penguatan LKP	7
A.4. Penguatan Anggota dalam Kesadaran tentang Akuntabilitas dan Integritas	8
B. Penguatan Perempuan usaha kecil-mikro.	
B.1. Peningkatan Usaha yang dimiliki PUK	9
B.2. Penguatan JARPUK di lokasi bencana & memperlebar wilayah JARPUK	12
C. Publikasi	
C.1. Pencetakan Buku Pengalaman Pendampingan Usaha dgn judul “Pada Kerja Kami Percaya”	14
C.2. Mengabarkan Berita PUK-mikro Melalui Dunia Maya	14
D. Advokasi Kebijakan	
D.1. Tingkat Jarpuk; Menuntut Hak, Menagih Janji	15
D.2. Tingkat Nasional; Mengubah pada Aras Nasional	15
E. Pengembangan Kapasitas Lembaga	
E.1. Pengembangan Sistem Data Base PUK	16
E.2. Monitoring JARPUK	16
E.3. Konsolidasi Internal	17
F. Jaringan Kerja	19

Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Melalui Pengembangan UMKM

Latar Belakang

Kontribusi UMKM pada perekonomian nasional signifikan. BPS 2009, menyatakan pelaku UMKM (usaha menengah, kecil dan mikro) mampu menyerap 79 juta tenaga kerja atau 99,40% dari total angkatan kerja. Ia berkontribusi 56,70% terhadap PDB, yang diperkirakan 60% dikelola perempuan (*Kementerian Koperasi dan UKM, 2011*).



Sayangnya, sektor UMKM dianggap “pelengkap” penderita dalam perekonomian nasional. Pemerintah seperti “sengaja” membiarkan UMKM berada dalam ketakberdayaan. Sistem ekonomi pasar bebas berwujud melalui perjanjian Indonesia dengan negara lain, seperti; AFTA, ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement), ASEAN+3, AANZFTA dsb, menghambat pengembangan UMKM. Parahnya pemerintah tidak kunjung memperbaiki sistem ekonomi berbiaya tinggi (seperti carut-marutnya perizinan, percaloan, KKN, dsb), sehingga makin memperpurukkannya.

Salah satu contohnya adalah dampungan ASPPUK yang bergerak pada usaha skala mikro. 400 perempuan pengusaha konveksi di NTB mengalami penurunan omset hingga 35% dan ratusan pengrajin batik di Jawa Tengah “kelimpungan”. Kelompok perempuan ini dulunya adalah produsen batik kini menjadi pedagang produk Cina karena harganya lebih murah. Ironisnya, bahan baku di Indonesia seperti benang, alat pewarna batik dsb, diekspor ke luar negeri, yang menyebabkan kekosongan stok di dalam negeri. Selain itu, penurunan surplus perdagangan Indonesia ke Cina mengalami defisit sebesar 3,61 sejak tahun 2008.

Di sisi lain, pertumbuhan pasar modern (seperti hypermart, careffour dsb) makin tak terkendali, mengakibatkan penurunan pasar rakyat di daerah. Antara tahun 1997 hingga 2005 (*FAO,2006*) bisnis ritel meningkat hampir 30% dengan pertumbuhan mencapai 15% untuk ritel modern dan 5% untuk pasar rakyat. Pergeseran itu mengengaskan, karena pasar rakyat merupakan tempat usaha perempuan pelaku usaha mikro.

Minimnya integritas dan akuntabilitas aparat pemerintah dari tingkat bawah hingga nasional ikut memperparah proses pembangunan dan pemberdayaan usaha mikro. Indeks korupsi yang menempatkan Indonesia dalam urutan paling tinggi menjadi gambarannya. Masyarakat pun

larut dalam situasi minim-integritas dan akuntabilitas. Di tangan birokrasi dan politisi minim integritas, program kesejahteraan rakyat jauh dari “jangkauan” rakyat kecil, khususnya kelompok perempuan miskin dan anak.

Padahal kaum perempuan berada di strata paling bawah dalam kemiskinan, karena kerap identik dengan kehidupan perempuan. Ironisnya di bidang ekonomi, perempuan yg berjumlah 52,7 persen dari populasi penduduk dunia, hanya memiliki 1/1000 jumlah kekayaan dunia, dan menerima 10 persen dari total gaji (MDG's, 2010). Muhammad Yunus, peraih Nobel 2009, mengatakan tidak mungkin berbicara kemiskinan jika menihilkan perempuan. Perempuan mengalami kelaparan dan kemiskinan lebih hebat dari laki-laki. Yunus melihat perempuan-peminjam lebih produktif menggunakan uangnya dari pada suami.

Data MDG's (2010) melaporkan, dari sepertiga penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 70%-nya adalah perempuan. Di Indonesia (BPS, 2009), dari jumlah penduduk miskin yang mencapai 32,53 juta jiwa (14,15%), 70% dari mereka adalah perempuan. Kemiskinan yang menimpa perempuan Indonesia, boleh jadi dilatari oleh banyak faktor. Angka buta aksara perempuan sebesar 12,28%, sedangkan laki-laki 5,84%. Dalam bidang kesehatan, status gizi perempuan masih merupakan masalah utama. Angka kematian ibu (AKI) juga masih sangat tinggi, yaitu sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup. Di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi (86,5%) daripada perempuan (50,2%).

Gambaran makro tersebut diatas juga dialami oleh PUK dan jaringan ASPPUK di tahun 2011. Oleh karenanya, berbagai pihak dalam internal ASPPUK terus melakukan refleksi. Kawan-kawan ASPPUK wilayah Jawa akhir tahun 2011 meluncurkan kegelisahannya dengan judul, “**Katanya Menggugat**”, dan “**Aku Dalam Gerak**. Menurutnya ASPPUK bagai membisu, tatkala produk import (seperti dalam batik, tenun, dsb) membanjir dan otomatis mengancam karya sebagian besar PUK sebagai kawan jejaring. Analisis ASPPUK terhadap rantai produksi dan pengorganisasiannya terasa “kering” sehingga menyumbang amunisi-minimal bagi gerakan PUK.

Namun begitu, masih ada yang menggembirakan beberapa titik di tahun tersebut. Banyak upaya yang dilakukan Ornop anggota ASPPUK dalam memperkuat ekonomi PUK membawa perubahan, baik ditingkat PUK, keluarga dan lingkungannya. Mulai dari berkembangnya usaha yang PUK kelola karena adanya upaya peningkatan kapasitas dalam pengembangan usaha hingga terjadinya perubahan kebijakan ditingkat kabupaten hingga propinsi.

Visi & Misi ASPPUK

Visi

Terwujudnya Perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro) yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender.

Misi

- Memfasilitasi terbangunnya gerakan PUK-mikro yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk mewujudkan sistem yang kondusif bagi proses demokratisasi.
- Memfasilitasi terbangunnya akses dan kontrol PUK-mikro terhadap sumberdaya ekonomi.

Dalam mewujudkan **Visi** dan mengemban **Misi**, ASPPUK berpegang pada nilai;

- Kesetaraan
- Keadilan
- Kebebasan
- Keterbukaan (*transparancy*).
- Keseimbangan; dan
- Anti kekerasan (*Non Violence*)

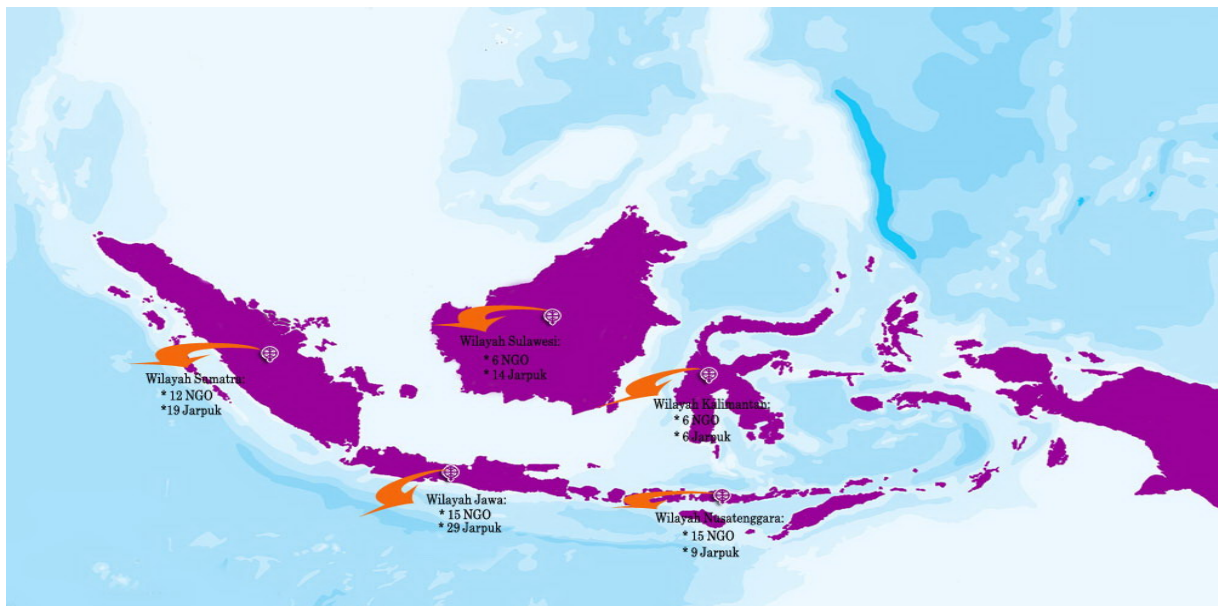
Tujuan ASPPUK

1. Menguatnya gerakan Perempuan Usaha Kecil (PUK)- Mikro agar mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya.
2. Menguatnya posisi dan kondisi PUK-mikro dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi
3. Menguatnya kapasitas Ornop anggota dalam memfasilitasi gerakan PUK-mikro
4. Terbangunnya solidaritas dan kerjasama antar Ornop, PUK-mikro dan komponen masyarakat sipil lainnya untuk menghadapi bentuk-bentuk ketidakadilan, terutama ketidakadilan gender.

Kegiatan Pokok

- A. Memfasilitasi dan Menguatkan Anggota Asosiasi**
- B. Penguatan Perempuan usaha kecil-mikro**
- C. Publikasi**
- D. Advokasi Kebijakan**
- E. Pengembangan Kapasitas Lembaga**
- F. Networking**

Peta Wilayah Anggota ASPPUK



Kegiatan Pokok

A. Memfasilitasi dan Memperkuat Anggota Asosiasi

Perkuatan anggota ASPPUK dilakukan dengan berbagai kegiatan;

A.1. Perkuatan Anggota Melalui Peningkatan Kapasitas Pengembangan Usaha & Advokasi

Perkuatan ASPPUK wilayah dan pendampingnya merupakan hal penting. Sebagaimana di tahun sebelumnya, tahun 2011 ASPPUK melakukan pengembangan kapasitas khususnya bidang pengembangan usaha yang berperspektif adil gender. Berbagai jenis pelatihan tersebut dilakukan di 5 wilayah melalui program “*Pengembangan Usaha Kecil Mikro Sebagai Kekuatan Ekonomi Rakyat*” yang didukung Hivos dalam selama 3 tahun (2008 – 2011) di Kudus, Sukoharjo, Solo (Jawa), Padang (Sumatera), Kalimantan Barat (Kalimantan).

Sementara itu, ASPPUK juga mengembangkan perkuatan kepada pendamping bagi NGO anggota khususnya yang bekerja di daerah; kota Padang, kab. Padang Panjang, kab. Gresik, kab. Jombang, kota Makasar, dan kab. Kupang. Di dalam program yang bertema, “*Memfasilitasi Perempuan Miskin Dalam Mengembangkan Aset Finansial dan Partisipasi Dalam Lembaga Pengambil Keputusan Publik di Tingkat Kampung, Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Nusatenggara Timur*”, ASPPUK disupport Ford Foundation dari tahun 2010 – 2012.

Dalam program, ASPPUK memfasilitasi peningkatan kapasitas PUK melalui Ornop anggotanya dalam pengembangan usaha, dari sisi manajemen, teknis dan perluasan pasar serta memperkuat jaringan jarpuk. Perkuatan organisasi PUK hingga mampu berjejaring dengan Organisasi masyarakat sipil lainnya agar memiliki posisi tawar terhadap pengambil kebijakan ekonomi di daerah. Sejalan dengan itu, program juga memfasilitasi peningkatan kapasitas sekretariat ASPPUK wilayah dalam layanan pengembangan usaha PUK.



Tujuan perkuatan Ornop dan aswil adalah diharapkan munculnya konsultan bisnis yang handal dan memiliki pemahaman komprehensif antara ekonomi dan keadilan gender. Untuk memperkuat strategi ini, ASPPUK menggandeng konsultan bisnis untuk bekerjasama dengan pendamping. Diharapkan dengan bantuan konsultan akan tercipta diksusi dan sharring pengalaman antara keduanya secara langsung di lapangan untuk memberikan konsultasi kepada PUK. Konsultan

ini secara profesional memberikan pelayanan dalam pengembangan usaha PUK melalui konsultasi, technical assistance dan fasilitasi pasar sehingga ASPPUK memiliki sumberdaya alternatif ke depannya. (secara detail dibahas berikutnya).

A.2. Pengembangan BDS (business development services) di Tingkat Ornop dan Wilayah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa untuk memperkuat kapasitas “pengembangan usaha”, ASPPUK melibatkan konsultan bisnis di wilayah program. Pelibatan konsultan meningkatkan mindset pendamping (calon BDS) dari Ornop untuk mulai memikirkan strategi keberlanjutan dengan memanfaatkan sumber daya terdekat. Kegiatan usaha dari kelompok dampingan menjadi contohnya.

Kondisi ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Ornop dan masyarakat dampingan yang merasa sungkan dan tak enak bila membicarakan “layanan” pendampingan usaha dalam konteks bisnis. Misalnya pemikiran perhitungan “fee” untuk sekedar biaya transport pendamping dari layanannya. Padahal, setelah didiskusikan bersama PUK, mereka menilainya bermakna wajar asalkan jenis pendampingannya juga berbuah hasil kongkrit.

Keengganan berbicara dalam konteks bisnis memiliki alasan. Pertama, mereka merasa ‘tidak enak’, sebab selama ini pendekatan yang dilakukan murni pemberdayaan. Jalan tengah yang sedang digagas – dan menjadi langkah awal – ASPPUK wilayah dan ornop pendamping adalah membeli produk-produk PUK dan mencoba untuk memasarkan melalui show room yang berada di sekretariat organisasi pendamping.

Meski begitu, secara perlahan pengembangan BDS di level pendamping mulai berbuah hasil. Beberapa organisasi pendamping mulai mengubah *mindsetnya* dan termotivasi untuk membentuk unit khusus yang mengelola bisnis. Gemawan (anggota ASPPUK di Kalbar) kini mempunyai toko di kota Sambas, menunjukkan keseriusannya dalam mengelola usaha. Sistem bagi hasil dari keuntungannya disepakati bersama antara ornop dan KPUK (atau PUK), 20% untuk toko dan 80% untuk PUK. Unit perdagangan M-PUK (Mitra PUK) yang dikembangkan ASPPUK wilayah Jawa, telah memasarkan berbagai produk PUK. Ia juga memasarkan produknya secara langsung dan melalui website www.mitraPUK.com. Dalam pengembangan *craft* dan kuliner, ASPPUK Wilayah Jawa-melalui M-PUK- membangun Klinik Bisnis Griya Mitra PUK. Griya Mitra PUK diperuntukkan sebagai unit untuk konsultasi dan pelatihan bagi siapapun yang berminat mengembangkan usaha dengan melibatkan PUK di operasionalnya.

Sementara itu, Yayasan Dian Tama (YDT) di Pontianak memfasilitasi penjualan produk PUK melalui ruang pameran di kantornya. YDT juga melakukan pengembangan produk dari anyaman rotan dan tenun ikat dayak menjadi aneka tas, dompet, kotak pensil, sajadah, tas laptop dsb. Produk PUK melalui etalase di Sekretariat, juga dilakukan Pusat Pengembangan Studi Wanita (PPSW) Pontianak.

Ditingkat seknas ASPPUK, showroom dan display online pada website (<http://asppuk.or.id>) dan facebook (asppuk@gmail.com) ASPPUK untuk promosi dan penjualan produk-produk PUK mulai berjalan, tapi belum ada personil khusus menanganinya. Saat ini Unit ini melekat pada divisi Pengembangan Ekonomi Perempuan dan LKP. Diharapkan 3-5 tahun kedepan, akan ada satu unit khusus yang berdiri sendiri sebagai salah satu sumber alternatif keuangan untuk keberlanjutan organisasi dan penguatan ekonomi PUK.



Itulah contoh perkembangan dukungan ASPPUK kepada Ornop anggota di tahun 2011. Diharapkan di tahun mendatang upaya perkuatan terus dilakukan dengan berbagai cara. Dengan adanya unit khusus, pengembangan bisnis bagi kemandirian Jaringan ASPPUK (Seknas, Sekwil dan NGO anggota) dalam pembiayaan operasional dan program dapat terwujud.

A.3. Monitoring dan Perkuatan LKP

Monitoring LKP dilakukan secara reguler, yaitu setiap enam bulan dengan kunjungan lapangan dan diskusi pengurus Nasional ASPPUK. Hasilnya tergambar sebagai

berikut. Pertama, LKP yang diharapkan sebagai sumber keuangan alternatif bagi pengembangan usaha PUK dan kebutuhan perempuan belum berfungsi optimal. Ketidاكلancaran angsuran beberapa anggota LKP dan mis-menejemen pengurus menyebabkan berkurangnya keaktifan anggota. Kepengurusan LKP juga belum menjalankan wewenang dan tugas, administrasi dan keuangan yang belum tertib dan belum tertulis di sebagian LKP, seperti terlihat dalam lokakarya refleksi perjalanan LKP tahun 2009 masih terlihat. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa anggota LKP merasakan manfaat dari keberadaannya.

Kedua, LKP baru berkuat pada permodalan anggotanya, belum menyentuh kebutuhan lain dari anggota, misalnya fasilitasi bahan baku dan bahan pelengkap (misalnya kemasan) dari anggotanya. Padahal banyak anggota, yang mengalami kendala dalam mendapatkan bahan baku dan bahan pelengkap.

Ketiga, diketahui jumlah dana stimulan yang dicairkan oleh Seknas ASPPUK kepada 23 LKP yang tersebar 5 wilayah sejak tahun 2002 – 2009 berjumlah Rp.1.145.000.000,-. Dari 23 LKP tersebut, 14 LKP pembayaran pinjamannya sudah jatuh tempo.

Melihat kondisi seperti itu, Seknas beberapa kali melayangkan surat baik melalui ASPPUK Wilayah maupun langsung ke Ornop anggota pendamping LKP tersebut untuk mengingatkan laporan perkembangan dan tugas Ornop pendamping dalam penguatannya.

Tergambar pula bawah masih ada LKP yang membuahkan keberhasilan. Seperti “Perempuan Mandiri” di Kecamatan Wonosalan-Jombang, dalam waktu 9 bulan berhasil menggalang dana dari dalam dengan jumlah Rp.10.229.500,- dan sudah dimanfaatkan oleh 159 anggota. LKP yang dibentuk kelompok perempuan dari sisa program PKH (program keluarga harapan) Wonosalan, Jombang, menjadi percontohan program Kementerian Sosial RI ditingkat nasional. (anggota LKP adalah anggota Kelompok PKH).

A.4. Perkuatan Anggota dalam Kesadaran tentang Akuntabilitas dan Integritas

Melalui program kerjasama antara ASPPUK-Partnership-LSPP-FITRA, dalam SIAP 2 (strengthening integrity and accountability program), ASPPUK melalui anggota di 5 daerah (Aceh, kab. Karo, kab. Klaten, kota Pontianak dan kab. Kupang) memperkuat kelompok perempuan untuk mendorong integritas dan akuntabilitas. Program ini dilaksanakan semenjak tahun 2010 hingga Juni tahun 2012. Diantara kegiatannya ialah; diskusi kampung untuk menganalisa program dan anggarannya serta menyusun usulan program sesuai kebutuhan masyarakat (terutama bagi kelompok perempuan miskin) dari 3 desa, workshop tingkat kecamatan untuk sosialisasi analisa dan usulan program setiap desa dan perumusan program prioritas tingkat kecamatan, FGD (focus group discussion) untuk pembentukan forum integritas tingkat kecamatan dan penyusunan strategi advokasi, dan terakhir upaya advokasi melalui forum integritas dengan *hearing* ke DPRD, lobby, siaran pers dan talk show di radio.

Di tahun 2011, ASPPUK melalui Ornop anggotanya melakukan kegiatan peningkatan integritas dan akuntabilitas aparat pemerintah melalui; workshop di kecamatan untuk sosialisasi analisa dan usulan program setiap desa dan perumusan program prioritas tingkat kecamatan, FGD (focus group discussion) untuk pembentukan forum integritas tingkat kecamatan dan penyusunan strategi advokasi, dan sebagian kecil yang sudah melakukan upaya advokasi melalui forum integritas dengan *hearing* ke DPRD. Adapun hasil sementara yang didapat dari 5 daerah di tahun 2011 adalah sebagai berikut.

Di Aceh, ada rencana pertemuan lanjutan antara kelompok perempuan, lurah, camat dan anggota dewan (DPRK) untuk membicarakan usulan perempuan tentang pasar rakyat untuk pemasaran produk. Di Pontianak, ada dana untuk keberlangsungan program posyandu sebesar 40 ribu perbulan yang sebelumnya tidak pernah dikabulkan pemerintah, dan rencana akan dibangunnya pasar rakyat di tingkat kecamatan yang pembangunannya dimulai tahun 2012. Di kab. Karo, anggota DPRD menerima usulan program air bersih dan saat berkunjung ke desa masyarakat telah memberinya cendaramata sebagai penanda, dan dia telah berkomitmen. Di kab. Kupang, usulan tentang air bersih telah diakomodasi meski melalui program PNPM. Di Klaten, perda anti pengutan telah menjadi usulan prioritas DPRD dan pemda, selain ada dana untuk KB susuk bagi masyarakat.

B. Perkuatan Perempuan Usaha Kecil-mikro (PUK-mikro)

B.1. Peningkatan Usaha yang dimiliki PUK



Melalui program “Pengembangan Usaha Kecil Mikro Sebagai Kekuatan Ekonomi Rakyat”, di tahun 2011, sejumlah peningkatan kapasitas dilakukan ASPPUK melalui Ornop anggotanya. Diantaranya; fasilitasi pengembangan pasar, pengembangan kapasitas JarPUK dalam membangun gerakan dan advokasi kebijakan, dukungan operasional sekretariat JarPUK,

pembuatan data base JarPUK, mendorong kader JarPUK terlibat dalam kebijakan publik, pendidikan kesadaran kritis bagi PUK, advokasi kebijakan melalui dialog dengan pengambil keputusan untuk menyampaikan gagasan.

Kegiatan pengembangan kapasitas usaha PUK diawali dengan pemetaan klaster/skala usaha (PUK dikategorikan dalam skala rintisan, berkembang, akumulasi modal), pelatihan-pelatihan untuk pengembangan usaha seperti pelatihan aspek manajerial dan

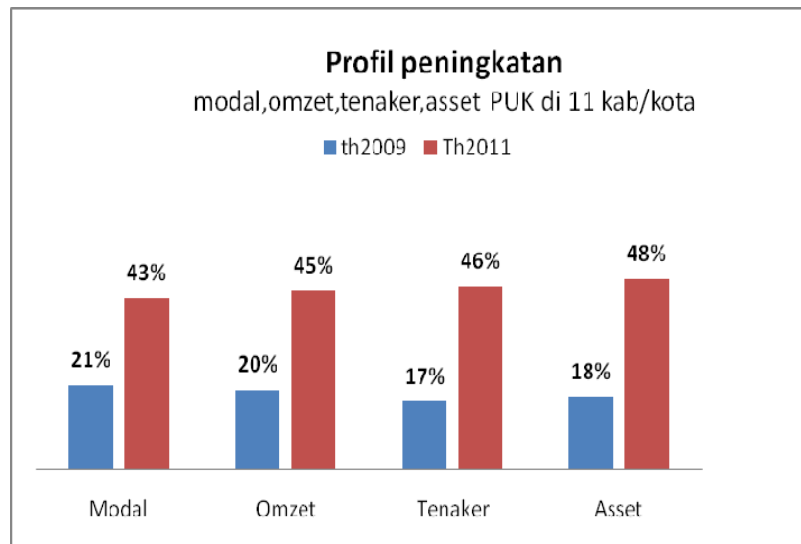
ketrampilan teknis produksi dalam pengembangan usaha, pelatihan motivasi usaha dan manajemen perencanaan usaha. Fasilitasi pengembangan pasar dimulai dengan pemetaan pasar oleh pendamping dan konsultan bisnis, asistensi terhadap PUK potensial untuk pengembangan produk dan pasar, fasilitasi dengan calon buyer, pameran produk PUK, pelatihan Teknologi Informasi (IT), pembuatan katalog dan media promosi produk unggulan PUK.

Semenjak tahun 2010, program memberi dukungan untuk operasional sekretariat JarPUK berupa perangkat komputer dan printer. Dukungan ini mematahkan anggapan bahwa perempuan gagap teknologi dan mempermudah dokumentasi data base JarPUK (Profil PUK).

Bagi ASPPUK dan JarPUK kebutuhan database PUK ini mempunyai peran yang sangat penting sebagai basis untuk kegiatan organisasi, melihat perkembangan usaha PUK, memudahkan setiap elemen organisasi untuk saling bertukar informasi tentang persoalan usaha antar wilayah, bahkan database dapat berfungsi sebagai alat advokasi PUK serta penggalangan dana.

Hasil yang dicapai dari sejumlah perkuatan PUK ialah sebagai berikut; pertama, adanya peningkatan Kemampuan dan ketrampilan PUK dalam mengelola usaha dengan orientasi profi. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan PUK dalam mengelola usahanya dapat dilihat dari 4 variabel, yakni omzet (penjualan), modal, tenaga kerja dan asset, seperti tabel berikut:

Tabel 1. Profil Peningkatan



Di akhir tahun 2011 pada 11 kabupaten/kota wilayah model program pilot pengembangan usaha kecil berorientasi bisnis menunjukkan prosentase rata-rata peningkatan modal, omzet, tenaga kerja dan asset cukup menggembirakan. Ini dapat dilihat dari peningkatan omzet PUK pada tahun 2009 (awal program) berada diangka 20%, dan pada akhir program

meningkat menjadi 45% dengan prosentase rata-rata peningkatan 56%.

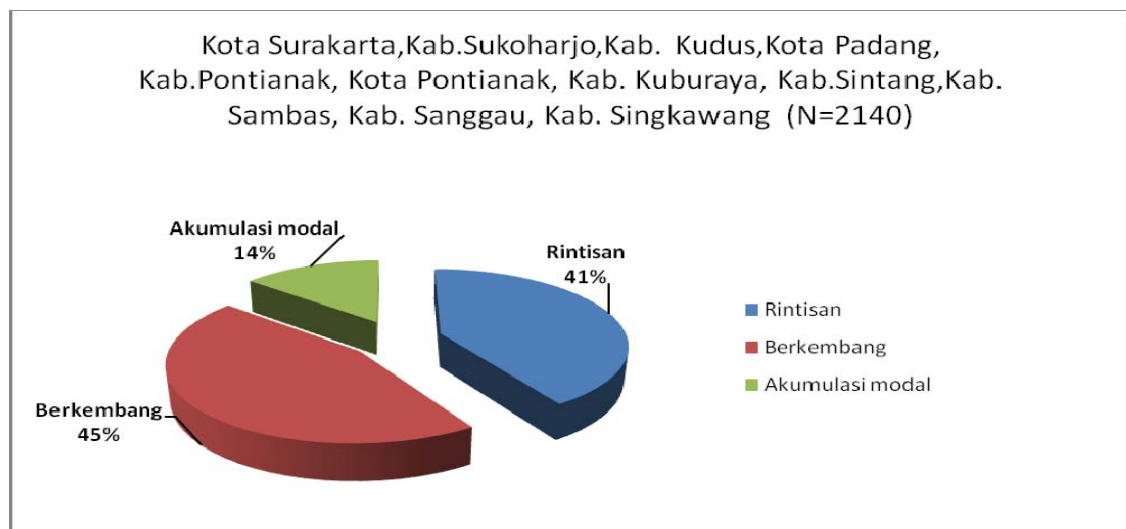
Rupina, penenun ikat dayak anggota JARPUK Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebelumnya dalam satu bulan biasa menghasilkan 2 lembar kain kebat, 20 lembar syal, 1 lembar pua kumbu. Sekarang dalam satu bulan ia bisa menghasilkan 12 lembar kain kebat, 120 lembar syal, dan 6 lembar pua kumbu karena Ibu Rupina meminta 6 PUK anggota kelompoknya untuk membantu mengerjakan tenunan. Benang dan pewarna berasal dari Ibu Rupina, jika kain tenun tersebut terjual beliau baru membayar 6 PUK yang membantunya.

Produksi Rakik Maco Badarai di Padang telah berkembang menjadi 5 kali lipat lebih besar dibanding ketika awal program dimulai, begitu pula dengan usaha Wajik (Bandung, Padang), serta beberapa produk kue kering lainnya, seperti bola-bola wijen, putri nali (akar kelapa), rakik (maco, kacang, dan udang), telah mulai juga memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan.

Dampak berkembangnya usaha PUK membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi keluarganya. Ini terlihat dari peningkatan asset, awal program berada diangka 18% dan diakhir program (2011) menjadi 48% dengan prosentase rata-rata peningkatan 63%. Hal initergambar dari perbaikan tempat tinggalnya, kemampuannya membeli kebutuhan sekunder seperti kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga, perhiasan, pakaian layak, dan mereka mampu menyekolahkan anak mereka ke kota besar.

Ibu Budiana, seorang penenun songket, PUK anggota JARPUK Kota Sambas, bisa menguliahkan anaknya di Malang, bisa membeli alat tenun, membuat tempat khusus tenun, dan bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada PUK yang lain. Awalnya ia hanya dibantu oleh 1 orang tenaga kerja, saat ini menjadi 3 orang.

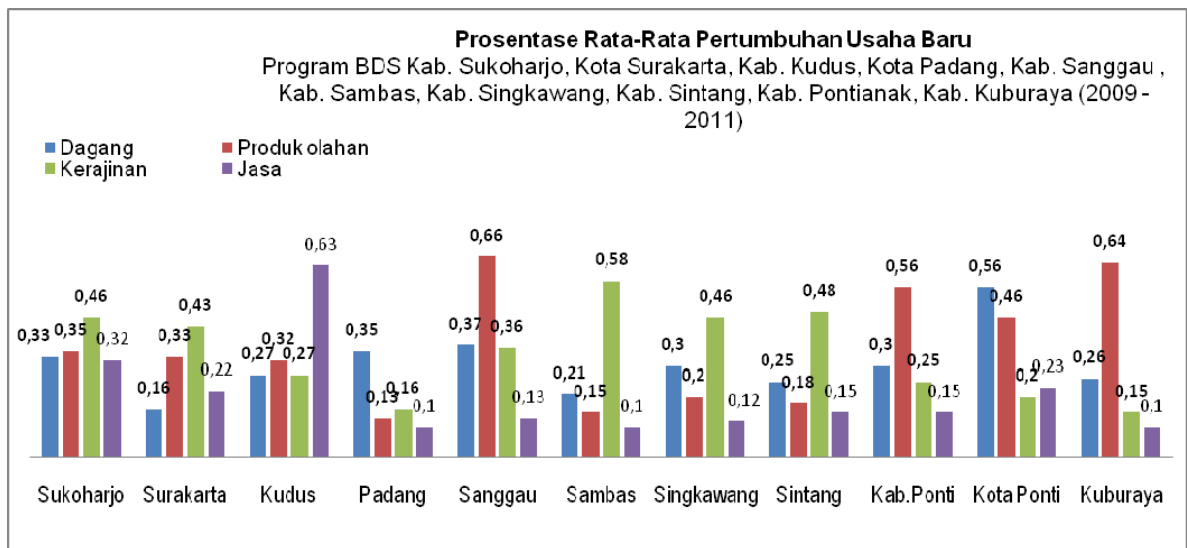
Di lain pihak, Usaha PUK yang dikategorikan dalam 3 skala usaha yakni rintisan, berkembang dan akumulasi modal setelah pemberian perlakuan (peningkatan kapasitas, fasilitasi pasar dan asistensi dan konsultasi bisnis menunjukkan pergeseran yang bervariasi di 11 kabupaten/kota wilayah model. Kategori skala usaha PUK ini berdasarkan variabel – variabel utama berikut: jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah omset dan asset per tahun.



Pada awal program, PUK yang berada pada skala rintisan sebesar 51% dan diakhir program (2011) bergeser menjadi 41%. Berarti sebagian PUK yang masuk kategori rintisan berpindah ke skala berkembang, ini dapat dilihat pada akhir program PUK yang berada pada skala berkembang meningkat menjadi 45% yang sebelumnya menunjukkan angka 39%. Begitu juga dengan PUK yang masuk kategori akumulasi modal, bergeser dari 10% menjadi 14%.

Kemudian, terjadi peningkatan investasi usaha dari laba yang diperoleh setiap tahun. Hal itu terlihat di gambar berikut ini yang menyajikan pertumbuhan usaha-usaha baru di 11 kabupaten/kota wilayah model_Prosentase rata-rata pertumbuhan usaha baru bervariasi untuk setiap wilayah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Prosentase Rata-Rata Pertumbuhan Usaha Baru



B. 2. Perkuatan JARPUK di lokasi bencana dan memperlebar wilayah JARPUK

Sebagai bagian dari respon ASPPUK terhadap gempa di Sumatera Barat dan perluasan wilayah JARPUK, sejak tahun 2010 – 2012 ASPPUK bekerja sama dengan Ford Foundation mengadakan program “Memfasilitasi Perempuan Miskin Dalam Mengembangkan Aset Finansial dan Partisipasi Dalam Lembaga Pengambil Keputusan Publik di Tingkat Kampung, Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Nusatenggara Timur”. Diantara kegiatan yang diperuntukan bagi pemberdayaan PUK ialah; Peningkatan Kapasitas Community Organizer (CO) dan pengelola KPUK dan LKP dan Pembentukan dan penguatan JARPUK, KPUK dan LKP baru dan yang telah ada di 6 kabupaten/kota terpilih.

Di tahun 2011, sejumlah kegiatan dilakukan, yaitu Mengorganisir pertemuan Community Organizer (CO) di masing-masing kabupaten / kota setiap dua bulan sekali untuk berbagi tentang pengalaman fasilitasi dan mendiskusikan solusi untuk masalah yang mereka hadapi di lapangan; Mengadakan pertemuan antara Community Organizer,

pengelola KPUK dan LKP, dan JARPUK di masing-masing kabupaten / kota setiap dua bulan sekali untuk membangun koordinasi pada tingkat kabupaten / kota, Mengadakan pelatihan keuangan mikro dan manajemen koperasi bagi Community Organizer, pengelola KPUK, LKP dan JARPUK, Memfasilitasi perempuan di kampung yang terpilih di enam kabupaten/ kota untuk pertemuan rutin dan membentuk kelompok-kelompok perempuan usaha kecil di tingkat masyarakat dan memberikan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis pada mereka untuk membentuk dan mengembangkan KPUK-KPUK; Mengadakan pertemuan rutin antara KPUK dan LKP serta JARPUK untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan pemecahan masalah dsb.

Hasilnya; terjadi penguatan institusi LKP/KPUK melalui pembahasan aturan bersama (AD/ART), penguatan kapasitas pengurus kelompok dan LKP dengan pelatihan Keuangan Mikro dan Koperasi, terjadi peningkatan jumlah modal LKP dan keanggotaan JARPUK (atau LKP) di enam kabupaten/kota, sebagian LKP telah melegalkan lembaganya melalui akte notaris, kader/ Community Organizer (CO) lokal bertambah kapasitasnya melalui pelatihan dan diskusi kritis, meluasnya jaringan JARPUK yang baru terbentuk dengan JARPUK lain di dalam satu wilayah, kesadaran akan pentingnya pengembangan usaha produktif sebagai wahana peningkatan kesejahteraannya bertambah. Hal itu seperti diungkap seorang PUK di Kupang.



“Di KPUK Setia Kawan Kelurahan Pasir Panjang, ada 8 PUK yang mengelola unit usaha pengelolaan Abon Ikan Babby Tuna “Manis ee”. Modal untuk produksi perdana diambil dari kas KPUK sebesar Rp 400.000,00. Seluruh keuntungan yang didapat dipakai untuk memodali KPUK. Hingga kini, produksi Abon Ikan Babby Tuna KPUK Setia Kawan dilakukan 2 minggu sekali. Di samping itu, kedelapan PUK juga mengelola Abon Ikan Babby Tuna yang

keuntungannya untuk dibagi rata bagi kedelapan pengelola dengan modal swadaya Rp 50.000,-/PUK/minggu.

Sementara di level advokasi, PUK melalui JARPUK terlibat dalam perubahan komunitasnya. Hal itu seperti terjadi di Makasar, dimana JarpuK melakukan kunjungan/audiensi kepada 10 Kepala kelurahan dan Kepala Kecamatan dimana KPUK berada untuk mengsosialisasikan keberadaan KPUK dan kegiatannya, rutinnya JARPUK melakukan Audiensi/dialog dengan instansi terkait (Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar, Dinas Koperasi, dll) atas inisiatif Kader/Co lokal dan atau pendamping demi kesejahteraan rakyat.

C. Publikasi

C.1. Pencetakan Buku Pengalaman Pendampingan Usaha dgn judul “Pada Kerja Kami Percaya”

Pengalaman pendampingan usaha dan kesadaran kritis PUK oleh ASPPUK melalui Ornop anggotanya, dan suka duka PUK dalam menjalankan usahanya sayang untuk dilupakan. Pengalaman berharga itu bagai intan yang bisa menjadi pembedajaran bagi organisasi dan individu yang berniat untuk mempelajarinya. Dengan niat untuk berbagi pengalaman dan refleksi itulah ASPPUK menerbitkan buku pengalamannya. Secara nasional ASPPUK mempublikasikan pengalamannya yang ini didasari dari program “*Pengembangan Usaha Kecil Mikro Sebagai Kekuatan Ekonomi Rakyat*” yang didukung Hivos dalam selama 3 tahun (2008 – 2011), dengan judul “*Pada Kerja Kami Percaya*”. Buku ini berisi tulisan dari para pendamping dan PUK di kota Pontianak, kab. Pontianak, Sambas, Sintang, Solo, Sukoharjo, Kudus, Padang Panjang dan kota Padang, serta kota Kupang. Penulis dari seknas ASPPUK pun melengkapi di awal tulisan yang berkisah latar belakang program dan gambaran kegiatan asppuk.

Sementara itu di tingkat wilayah, ASPPUK Jawa juga mempublikasikan refleksi dan pengalamannya dalam buku. Mereka memberi judul penerbitannya dengan “*Katanya Menggugat*”, dan “*Aku Dalam Gerak*”. Buku tersebut diluncurkan di dalam workshop yang bertema dengan refleksi atas gerakan JARPUK dan ASPPUK di Desember 2011 di hadapan ketua dan pengurus JARPUK seJawa, serta pengurus ASPPUK nasional di kota Solo, Jawa Tengah. Workshop yang peluncuran buku yang difasilitasi Hendro Sangkoyo (aktivis gerakan sosial) menghasilkan point penting yang menjadi masukan untuk FORNAS ASPPUK tahun 2012.



Buku-buku tersebut dicetak sebanyak 500 eksemplar dan telah didistribusikan kepada seluruh Ornop anggota ASPPUK di Indonesia, dan mitra jaringan serta kalangan pemerintah dan legislatif baik di nasional dan daerah.

C.2. Mengabarkan Berita PUK-mikro Melalui Dunia Maya

Semenjak website ASPPUK dipublis, ia berperan penting dalam pengelolaan jaringan. Negara Indonesia yang terdiri gugusan pulau membutuhkan jalinan komunikasi yang efisien dan cepat. Menanggapi itu, sekretariat nasional ASPPUK sebagai lokus jaringan, menata sistem informasinya dengan mengembangkan website ASPPUK dengan menambah sejumlah display produk.

Di tahun 2011, seiring dengan mulai maraknya kegiatan yang digagas ASPPUK, berita dari berbagai wilayah yang bercerita tentang aktifitas pendampingan dan kegigihan PUK di kegiatan ekonomi muncul setiap bulannya. Pengelola website ASPPUK berusaha semaksimal mungkin untuk mempublikasikan artikel berupa berita, tulisan pendek, atau cerita pengalaman setiap satu minggu sekali. Bahan berita disusun oleh staf seknas sendiri atau menerima kiriman tulisan dari berbagai wilayah anggota ASPPUK.

Statemen ASPPUK sebagai jaringan yang termuat di media nasional dan daerah dalam menanggapi isue sosial-politik-budaya nasional, juga dipublikasikan di website. Selain website, ASPPUK juga mulai mengembangkan mailinglist dan menggagas media sosial meski belum maksimal dalam pengelolaannya. Diharapkan media sosial ini menjadi media lain yang bisa dipergunakan ASPPUK dalam melakukan edukasi, sharing informasi dan pengetahuan serta kampanye publik demi terciptanya masyarakat yang demokratis dan adil gender.

D. Advokasi dan Networking

D.1. Tingkat Jarpuk; Menuntut Hak, Menagih Janji

Di tahun 2011, JARPUK di kabupaten tetap melakukan advokasi yang berkaitan dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Hal itu seperti terjadi di sejumlah daerah, khususnya di lokasi program seperti disebut diatas, JARPUK mendesakkan Peraturan Desa (Perdes) tentang keterlibatan /partisipasi perempuan dalam kebijakan di tingkat Desa (penyusunan Raperdes). Mereka kini terlibat aktif di dalam musrenbang dari tingkat desa dan kecamatan. Sementara untum musrenbang dan pembahasan RAPBD tingkat kota dan kabupaten, JARPUK mengajak NGO pendamping dan jaringan OMS lain untuk bersama-sama mengadvokasikannya.

Terkhusus di 5 daerah yang sedang mendorong terwujudnya integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara, di tahun itu, forum yang difasilitasi NGO dan JARPUK, “forum integritas” mengawal usulan yang adil gender di RAPBD di akhir tahun 2011. Sebelumnya mereka telah menganggas diskusi kampung dan workshop tk kecamatan untuk mendorong usulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama kelompok perempuan. Meski sulit dalam melakukan perubahan dalam struktur APBD, namun mereka berhasil melibatkan aparat desa dan kecamatan untuk berjuang bersama dalam menyejahterakan masyarakat terutama kepentingan perempuan miskin dan anak.

D.2. Tingkat Nasional; Mengubah pada Aras Nasional



Sementara itu, di tingkat nasional, ASPPUK melakukan sejumlah aktifitas demi terwujudnya masyarakat yang demokratis, melalui berbagai hal;

1. Adanya statemen atau posisi politik ASPPUK terhadap kondisi sosial dan ekonomi nasional yang

berupa siaran pers yang dikeluarkan di akhir tahun 2011. Siaran pers tersebut disampaikan berama jaringan lain, yaitu IGJ, Kiara, SPI, dsb, di Bakoel coffie Cikini. Sejumlah media nasional memuatnya.

2. Keterlibatannya sekretariat nasional dalam pengkritisan RAPBN 2012, yang beserta masyarakat sipil lainnya melakukan analisis anggaran nasional pada bulan November dan Desember 2011.
3. Bersama koalisi masyarakat untuk APBN kesejahteraan, ASPPUK juga mengajukan JR (judicial review) terhadap APNB-P 2011 yang dinilai tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
4. Aktif dan berpartisipasi dalam advokasi masyarakat sipil untuk pencapaian MDGs (Millenium Development Goals). Dalam hal itu, ASPPUK juga menjadi anggota aktif dalam Koalisi masyarakat sipil untuk MDGs.

E. Pengembangan Kapasitas Lembaga

E.1. Pengembangan Sistem Data Base PUK

Kegiatan ini mendukung fungsi ASPPUK sebagai jaringan Nasional. Hal itu dilakukan karena banyak data yang dikumpulkan di sekretariat nasional, namun pengolahannya menggunakan keahlian orang lain. Oleh karenanya, sekretariat mengembangkan system informasi pelayanan berupa **system Komputerisasi Data tentang data PUK**. Kegiatan penyusunan data base dengan komputerisasi dilakukan bekerjasama dengan *Lembaga Jaring*, yang ahli dalam pengembangan data melalui sistem informasi. Hasil data base ini bisa diakses JARPUK yang telah ikut mendata anggota PUKnya.

E.2. Monitoring JARPUK

Monitoring secara teratur dilakukan ASPPUK (baik melalui seknas maupun sekwil) setiap 6 bulan. Sebelum monitoring dilakukan, setiap LKP wajib mengirim laporan kepada seknas ASPPUK (dan di tembuskan ke ASPPUK wilayah) setiap tiga bulan. Dari laporan tersebut, perkembangan LKP dan JARPUK secara tertulis terlihat. Disamping itu, monitoring juga dilakukan Komite eksekutif Nasional dan ASPPUK wilayah – dalam setiap forum wilayah -- setiap satu tahun sekali.

Hasil monitoring terlihat bahwa LKP dan JARPUK masih dalam proses pembenahan dan LKP memiliki potensi besar sebagai penguatan ekonomi, tetapi rawan terjadi *elitisasi*. Untuk antisipasi dan mengatasi masalah diatas - ASPPUK



secara tertulis menerbitkan panduan konsep LKP untuk dibagikan kepada NGO anggota dan menjelaskan tentang landasan dasar, mekanisme-prosedur serta sasaran LKP.

E.3. Konsoliasi Internal

Peningkatan kapasitas lembaga merupakan kegiatan yang penting, sehingga kegiatan ini terumuskan dengan jelas di pedoman tertulis ASPPUK (AD/ART, Peraturan khusus). Dalam hal itu, sekretariat nasional bertugas untuk memfasilitasi terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas tersebut, diantaranya;

- Rapat Pengurus ASPPUK, yang diikuti KEN (Komite Eksekutif Nasional), KEW (Komite Eksekutif Wilayah), SEN (Sekretaris Eksekutif Nasional), SEW (sekretaris Eksekutif Wilayah) diadakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- Pertemuan pengurus KEN dengan SEN minimal 6 (enam) bulan sekali.
- Forum Wilayah yang dihadiri oleh setiap Ornop anggota yang ada di wilayah masing-masing, diadakan setiap satu tahun sekali.

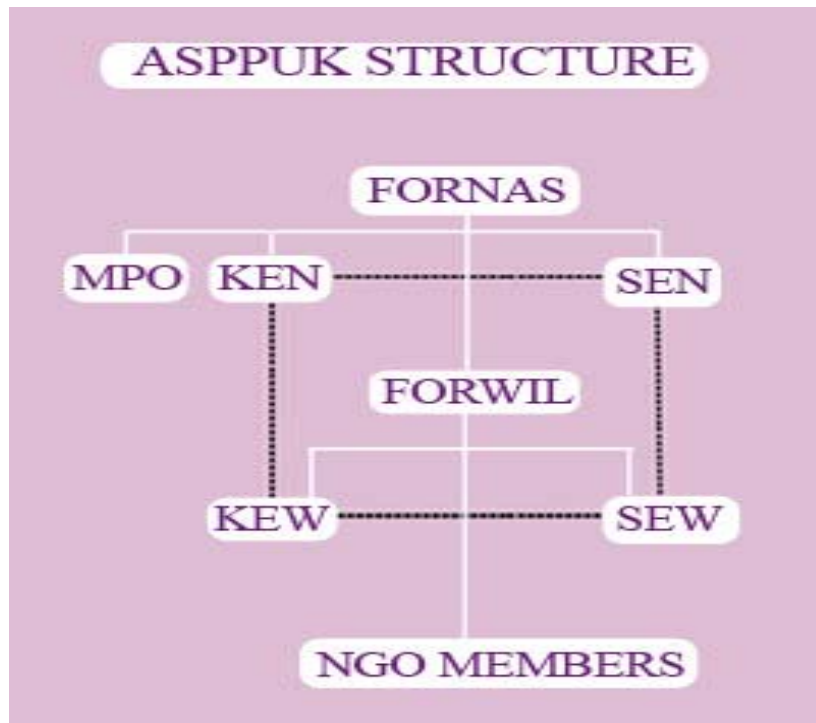
FINANCIAL REPORT 2011
LAPORAN AKTIVITAS

	(Rp)	(EUR)
PENERIMAAN		
Penerimaan Program	1,826,375,310	152,197.94
Iuran Anggota	3,600,000	300.00
Fee Lembaga ASPPUK	625,860,443	52,155.04
Kontribusi Perorangan	11,550,000	962.50
Sumbangan	-	-
Lain-lain	1,200,000	100.00
Jumlah Penerimaan	2,468,585,753	205,715.48
BEBAN-BEBAN		
Beban Program	2,673,602,610	222,800.22
Beban Operasional	646,283,587	53,856.97
	3,319,886,197	276,657.18
Jumlah Pendapatan Kotor	(851,300,444)	(70,941.70)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Jasa Giro / Bunga Bank	28,141,609	2,345.13
Bunga KM	587,000	48.92
Administrasi Bank	(10,445,451)	(870.45)
Lain-lain	-	-
Selisih Kurs	-	-
Jumlah Pend.(Beban) Lain-lain	18,283,158	1,523.60
Jumlah Perubahan Aktiva Bersih	(833,017,286)	(69,418.11)
Jumlah Aktiva Bersih Awal Tahun	4,584,967,928	382,080.66
Jumlah Aktiva Bersih Akhir Tahun	3,751,950,642	312,662.55

NERACA

	(Rp)	(EUR)
AKTIVA LANCAR		
Kas & Setara Kas	1,311,394,001	109,282.83
Piutang Kredit Mikro	251,651,800	20,970.98
Piutang LKP	1,194,941,250	99,578.44
Piutang Karyawan	-	-
Uang Muka	1,674,670,797	139,555.90
Jumlah Aktiva Lancar	4,432,657,848	369,388.15
AKTIVA TIDAK LANCAR		
Harga Perolehan	245,114,600	20,426.22
Akumulasi Penyusutan	(190,880,458)	(15,906.70)
Nilai Buku	54,234,142	4,519.51
JUMLAH AKTIVA	4,486,891,990	373,907.67
KEWAJIBAN		
Hutang Donor	25,000,000	2,083.33
Hutang Tabungan Solidaritas	20,985,755	1,748.81
Hutang pada Lembaga Lain	688,955,593	57,412.97
Biaya YMH Dibayar	-	-
Jumlah Kewajiban	734,941,348	61,245.11
AKTIVA BERSIH		
Aktiva Bersih Awal Tahun	4,584,967,928	382,080.66
Perubahan Aktiva Bersih	(833,017,286)	(69,418.11)
Jumlah Aktiva Bersih	3,751,950,642	312,662.55
JUMLAH KEWAJIBAN & AKTIVA BERSIH	4,486,891,990	373,907.67

Stuktur ASPPUK



F. Jaringan Kerja

USAID	US
Kemitraan	Indonesia
Hivos	Belanda
Ford Foundation	US
E-net For Justice Indonesia	Jaringan Pendidikan untuk Keadilan Indonesia
APBN Kesejahteraan	Gerakan untuk mendorong kesadaran akan peruntukan APBN untuk kesejahteraan rakyat
ASPBAE	Jaringan pendidikan untuk orang dewasa di tingkat regional
Social Wacth	Jaringan global untuk keadilan sosial dan keadilan gender.